



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia

Namira<sup>1</sup>, Rizka Zuhrotul Aini<sup>2</sup>, Siska apriani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [namiraiftina@gmail.com](mailto:namiraiftina@gmail.com),

<sup>2</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [riskazuhrotulaini@gmail.com](mailto:riskazuhrotulaini@gmail.com),

<sup>3</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [siskaapriani320@gmail.com](mailto:siskaapriani320@gmail.com).

**Abstrak:** Kesetaraan gender dalam politik Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti minimnya akses perempuan terhadap posisi strategis dan dominasi budaya maskulin dalam sistem politik. Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung, realisasi partisipasi perempuan secara merata masih belum optimal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keterwakilan yang adil bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Manfaat penelitian ini dilakukan untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik bermanfaat untuk memperkuat demokrasi dengan melibatkan perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kehadiran perempuan di ruang politik dapat meningkatkan perhatian terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Artikel ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan realitas kesetaraan gender dalam politik di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil dari pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam politik di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya regulatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Kondisi ini mengindikasikan perlunya komitmen politik yang lebih kuat serta pemberdayaan perempuan agar kesetaraan gender benar-benar terwujud dalam praktik politik..

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, perempuan dalam politik, politik Indonesia, budaya patriarki, keadilan gender.

*Abstract Gender equality in Indonesian politics still faces challenges, such as women's limited access to strategic positions and the dominance of masculine culture in the political system. Although there are already supporting regulations, the realization of women's participation evenly is still not optimal. This article aims to examine the fair representation of women in the public decision-making process. This is expected to produce policies that are more inclusive and responsive to the needs of all levels of society. The benefits of this research are carried out to encourage gender equality in politics to strengthen democracy by involving diverse perspectives in decision-making. In addition, the presence of women in the political space can increase attention to social issues such as education, health, and child protection. This article is compiled using a qualitative method with a descriptive approach to describe the reality of gender equality in politics in Indonesia. Data were collected through literature studies from relevant journals, books, and policy documents. The results of the discussion on gender equality in politics in Indonesia show that although there are regulatory efforts such as a 30% quota for women's representation, its implementation still faces various structural and cultural obstacles. This condition indicates the need for a*

*stronger political commitment and women's empowerment so that gender equality is truly realized in political practice.*

**Keywords:** *Gender equality, women in politics, Indonesian politics, patriarchal culture, gender justice*

<b>*Correspondence Address:</b>	<a href="mailto:namiraitina@gmail.com">namiraitina@gmail.com</a>
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	2 Juni 2025	2 Juni 2025	30 March 2026

## PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Dilihat dari latar belakang historisnya, konsep kesetaraan gender menurut Rowbotham sebenarnya lahir dari pemberontakan kaum perempuan di negara-negara barat akibat penindasan yang dialami mereka selama berabad-abad lamanya. Sejak zaman Yunani, Romawi, Abad Pertengahan (the Middle Ages), dan bahkan pada “abad pencerahan” sekali pun, barat menganggap wanita sebagai makhluk inferior, manusia yang cacat, dan sumber dari segala kejahatan atau dosa. Hal ini pun kemudian memunculkan gerakan perempuan barat menuntut hak dan kesetaraan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan feminis.

Kelahiran “feminisme” dibagi menjadi tiga gelombang, yakni feminisme gelombang pertama yang dimulai dari publikasi Mary Wollstonecraft berjudul “Vindication of the Rights of Women” pada tahun 1792, yang menganggap kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan disebabkan oleh ketergantungan ekonomi pada laki-laki dan peminggiran perempuan dari ruang publik. Setelah itu, muncul feminisme gelombang kedua dengan doktrinnya yang memandang perbedaan gender sengaja diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap perempuan. Pada gelombang kedua inilah dimulai gugatan perempuan terhadap institusi pernikahan, keibuan (motherhood), hubungan lawan jenis (heterosexual relationship) dan secara radikal mereka berusaha mengubah setiap aspek dari kehidupan pribadi dan politik. Terakhir adalah feminisme gelombang ketiga yang lebih menekankan kepada keragaman (diversity), sebagai contoh ketertindasan kaum perempuan heteroseksual yang dianggap berbeda dengan ketertindasan yang dialami kaum lesbi dan sebagainya.

Kesetaraan gender dalam politik Indonesia masih menjadi isu yang cukup kompleks dan menantang. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti kuota 30% dalam legislatif, angka keterwakilan perempuan di posisi politik strategis masih sangat terbatas. Perempuan sering kali terhalang oleh stereotip tradisional yang menempatkan mereka pada peran domestik, serta sistem patriarkal yang mendominasi banyak sektor masyarakat. Hal ini menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam dunia politik, apalagi untuk menduduki posisi pengambil keputusan. Selain itu, perempuan juga menghadapi tantangan besar dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkompetisi di politik, seperti pembiayaan, jaringan, dan dukungan media, yang sering kali lebih mudah diakses oleh laki-laki.

Tidak hanya itu, perempuan juga kerap menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan berbasis gender dalam dunia politik. Intimidasi, fitnah, dan ancaman seksual sering kali diterima oleh perempuan yang berusaha untuk menantang struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki. Selain itu, partai politik di Indonesia umumnya dipimpin oleh laki-laki dan cenderung kurang mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik, baik dalam struktur maupun kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati, dibutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan kuota; perubahan mendasar dalam budaya politik, penghapusan hambatan yang dihadapi perempuan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya politik menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang yang setara bagi perempuan di dunia politik Indonesia.

Untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik Indonesia, solusi yang dapat diterapkan meliputi penguatan kuota perempuan dalam legislatif dan eksekutif, bukan hanya sebagai angka tetapi dengan memastikan kualitas dan kapasitas perempuan dalam posisi tersebut. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat dan partai politik tentang pentingnya kesetaraan gender, serta menghapuskan stereotip dan sistem patriarkal yang menghambat partisipasi perempuan. Dukungan terhadap perempuan dalam politik harus mencakup akses yang lebih besar ke sumber daya, seperti pembiayaan, pelatihan kepemimpinan, dan jaringan politik. Di samping itu, perlu adanya kebijakan yang melindungi perempuan dari kekerasan dan pelecehan berbasis gender, serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Dengan pendekatan komprehensif yang mencakup perubahan struktural, sosial, dan kebijakan, kesetaraan gender dalam politik Indonesia dapat lebih terwujud.

## **METODE | METHOD**

Artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur, di mana data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai jurnal yang relevan dengan topik kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. Danial dan Warsiah (2009): mendefinisikan sebagai penelitian yang mengumpulkan buku dan majalah yang berkaitan dengan masalah atau tujuan penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan sumber jurnal yang membahas kebijakan kesetaraan gender, peran perempuan dalam politik, tantangan yang dihadapi, serta studi perbandingan dengan negara lain. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama yang muncul dalam jurnal-jurnal tersebut, yang kemudian disintesis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya, kritik terhadap temuan-temuan tersebut disusun untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam politik Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION**

### **a. Permasalahan Kesetaraan Gender di Indonesia**

Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun, gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Dalam realitas kehidupan telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan yang melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Perbedaan antara laki-laki gender dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos- mitos. Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Peran ini lebih banyak diserahkan kepada kaum perempuan, sedangkan peran publik yang menghasilkan uang, kekuasaan dan pengaruh diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja yang tidak seimbang melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan.

Beberapa permasalahan kesetaraan gender di Indonesia.

- Norma sosial dan budaya patriarki: Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menyebabkan perempuan seringkali dianggap sebagai warga kelas dua. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan.

- Hambatan struktural: Sistem politik yang masih belum sepenuhnya inklusif juga menjadi kendala bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Kurangnya akses terhadap sumber daya politik seperti pendanaan kampanye, pelatihan kepemimpinan, dan jaringan dukungan politik membuat perempuan sulit bersaing dengan laki-laki.
- Diskriminasi gender: Diskriminasi gender masih terjadi dalam berbagai aspek kehidupan politik, seperti dalam proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan representasi di lembaga legislatif dan eksekutif.

#### **b. Kesetaraan Gender di Dunia Perpolitikan Indonesia**

Di dunia politik, memang dominasi lelaki masih nampak. Misalnya jika kita secara kuantitatif berhitung, berapa banyak perempuan yang memasuki kawasan pimpinan di perpolitikan Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini yang memang masih menjadi ganjalan di dalam kerangka untuk kesetaraan gender. Namun demikian, di akhir-akhir ini, akses perempuan di dalam politik memang sudah mulai tampak dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan di dalam politik praktis. Sekarang semakin banyak perempuan di dunia legislatif, birokrasi, dan juga jabatan-jabatan politik lain. Ada beberapa bupati perempuan yang terdapat di Indonesia, demikian pula gubernur. Bahkan ada bupati perempuan yang bisa menjabat dua kali periode, demikian pula gubernur. Tidak terhitung yang berlama-lama di parpol dan kemudian berlanjut di lembaga legislatif.

Semakin terbuka akses keterbukaan politik, maka tentu akan semakin banyak perempuan yang akan bisa berkompetisi dengan kaum lelaki di dalam pentas publik. Oleh karena itulah pemberian kuota kepada perempuan di dalam representasi politik tentulah tidak penting. Meskipun begitu, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui. Namun adanya hak-hak tersebut tidak menjamin adanya sistem politik yang demokratis di mana asas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Adanya keterwakilan perempuan di dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini. Selama ini di Indonesia, kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri. Pilihan politik perempuan banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman, atau keluarga.

Kesetaraan gender di dunia perpolitikan Indonesia merupakan isu yang terus berkembang dan mendapatkan perhatian serius. Secara historis, perempuan di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, seringkali terpinggirkan dalam bidang politik dan kepemimpinan. Namun, dengan perjuangan yang berkelanjutan, kesetaraan gender perlahan mulai mendapatkan tempat, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi.

Berikut adalah beberapa hal yang penting terkait kesetaraan gender di dunia perpolitikan Indonesia:

##### ➤ Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Sejarah dan perkembangan: Perempuan Indonesia telah mulai terlibat dalam politik sejak era perjuangan kemerdekaan, meskipun keterlibatannya masih terbatas. Salah satu tokoh perempuan penting adalah R.A. Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Setelah kemerdekaan, perempuan mulai mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilu, yang menjadi langkah pertama menuju kesetaraan.

Perempuan dalam jabatan politik: Seiring berjalannya waktu, beberapa perempuan telah mencapai posisi penting, seperti Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden ke-5 Indonesia, serta banyak perempuan yang memegang posisi penting lainnya di legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

➤ **Regulasi dan Kebijakan**

Undang-Undang tentang Partisipasi Perempuan: Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mendukung kesetaraan gender dalam politik, salah satunya adalah UU No. 10/2008 tentang Pemilu yang mengatur bahwa partai politik harus mencalonkan perempuan minimal 30% di setiap daftar calon legislatif (Caleg). Meskipun aturan ini belum sepenuhnya tercapai, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik.

Kebijakan kuota: Kebijakan kuota perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah perempuan yang menduduki kursi di parlemen dan memberikan mereka akses yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan negara.

➤ **Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Politik**

Stereotip Gender: Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan dalam politik adalah pandangan stereotip tentang peran perempuan di masyarakat, yang seringkali dianggap tidak cocok atau kurang kompeten untuk memimpin. Pandangan ini bisa membuat perempuan kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dalam berpolitik.

Kendala Budaya dan Sosial: Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi hambatan dalam memajukan kesetaraan gender di bidang politik. Banyak masyarakat yang lebih memilih pemimpin laki-laki, bahkan jika perempuan memiliki kemampuan yang sama.

Kekerasan dan Intimidasi: Perempuan politik juga sering kali menjadi korban kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun verbal, serta intimidasi dalam bentuk pelecehan seksual atau cyberbullying. Hal ini dapat mengurangi keinginan perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam politik.

➤ **Perkembangan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan**

Peningkatan jumlah perempuan di legislatif: Sejak diberlakukannya kebijakan kuota, jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif perlahan meningkat. Pada Pemilu 2019, misalnya, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR meningkat meskipun masih jauh dari target 30% yang diinginkan.

Partai politik yang mendukung perempuan: Beberapa partai politik di Indonesia juga mulai mengadopsi kebijakan yang mendukung perempuan, baik dengan memberi kesempatan lebih banyak pada perempuan untuk mencalonkan diri, maupun dengan membentuk wadah perempuan di dalam partai. Misalnya, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang mempromosikan keterlibatan perempuan dalam politik.

➤ **Kesadaran dan Pendidikan Gender**

Pendidikan gender: Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender di kalangan masyarakat, serta pendidikan yang lebih baik mengenai hak-hak perempuan, juga berperan penting dalam mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam

politik. Selain itu, pendidikan gender juga membantu mengurangi stereotip dan norma sosial yang membatasi peran perempuan.

Penguatan jaringan perempuan: Jaringan perempuan di politik, seperti organisasi-organisasi yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, semakin berkembang. Organisasi ini membantu memberikan pelatihan, pendampingan, dan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik.

➤ **Peran Pemerintah dan Lembaga Internasional**

Dukungan Pemerintah: Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, berusaha untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan dalam politik. Salah satunya dengan meningkatkan representasi perempuan dalam setiap level pemerintahan.

Peran Lembaga Internasional: Organisasi internasional seperti PBB juga memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender di Indonesia, termasuk di bidang politik. Mereka sering memberikan bantuan dan rekomendasi kebijakan yang mendukung perempuan dalam politik dan pemerintahan.

**c. Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik**

Pendidikan politik adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik. Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan.

Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus, untuk itulah salah satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan, mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini.

#### **d. Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik**

Pada dasarnya, kuota 30% yang diberikan untuk keterlibatan perempuan dalam politik dan keterwakilan perempuan dalam parlemen yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), masih sangat jauh dengan kenyataannya. Walau sejatinya angka 30% ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Namun sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut hal ini sebagai langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam langkah politiknya. Karena selama ini perempuan hanya berjumlah 12 % saja yang berkiprah dalam ruang sidang di Senayan. Merupakan fenomena baru dan menyegarkan dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, meskipun dalam tataran yang relatif kecil dan sederhana, tetapi masih banyak harapan dan peluang yang bisa dilalui oleh para perempuan dalam partisipasinya untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan undang-undang tersebut sebagai penghargaan terhadap pengorbanan dan perjuangan perempuan yang selama terpinggirkan oleh sistem. Karena pada kesempatan kali ini, publik akan memberikan penilaian langsung terhadap partai-partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepedulian terhadap perjuangan serta potensi- potensi perempuan, bahkan ada semacam kecaman dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi-organisasi kemasyarakatan perempuan lainnya, untuk tidak memilih gambar partai yang tidak memperhatikan kepentingan perempuan atau dengan tidak merealisasikan Undang- Undang tentang keterwakilan perempuan.

Partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berpolitik merupakan salah satu prinsip perjuangan para aktivis perempuan, sampai diamanatkan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang kemudian diadopsi oleh sidang umum PBB tahun 1979 yang ditetapkan pada tahun 1981. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia no. 7 tahun 1984 pada tanggal 24 juli 1984 melalui lembar negara no. 29 tahun 1984. Meskipun demikian, sampai saat ini perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan masih belum optimal karena adanya diskriminasi secara struktural dan kelembagaan yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Pendiskriminasian semacam ini semakin melemahkan sumber daya perempuan terlebih ketika para perempuan tidak mempunyai keinginan untuk merubah dan melakukan pembenahan- pembenahan sejak dini. Untuk itu, adapun upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yakni pertama, harus diusahakan adanya peraturan atau UU tentang pemilu, pilkada, dan partai politik yang mencantumkan perihal affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan privilege tertentu kepada keterwakilan perempuan, sehingga dengan adanya affirmative action, diharapkan keterwakilan perempuan akan meningkat dan sesuai harapan. Kedua, diperlukan adanya usaha- usaha peningkatan pendidikan bagi perempuan secara terus menerus. Karena dengan adanya peningkatan taraf pendidikan bagi kaum perempuan, maka akan meningkatkan kompetensi dan daya saing kaum perempuan di bidang politik. Ketiga, diperlukan adanya pencerahan dan pendidikan politik yang terus-menerus kepada masyarakat luas, bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga- lembaga lain, tentang unggulnya pemimpin politik perempuan. Dengan usaha itu diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan.

## **KESIMPULAN | CONCLUSION**

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos. Perbedaan jenis jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik.

Politik pada hakekatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Hingga saat ini, kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia masih sangatlah didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling sederhana yaitu keluarga, tingkat masyarakat hingga tingkat politik formal. Gender menjadi isu yang banyak dibicarakan seiring dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan.

Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim.

## REFERENSI | REFERENCE

- Aula, M. R. (2023). *Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia*. Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi, 8(2).
- Al Uyun, Dhia, Maulidia Mega, Sujarwati Ema, & Pangalila Daisy. 2023. *Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative
- Gusmansyah, Wery. *Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. IAIN Bengkulu.
- Gusmansyah, Wery. "Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia." Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak 1.1 (2019).
- Hartati, Sri. 2020. *Gender dalam Birokrasi Pemerintahan*. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.
- Hidayati, Khozanah. 2010. *Semangat Kartini dalam Perjuangan Kesetaraan Gender Politik..*